

Sejarah Religi sebagai Pilar Pembangunan dan Kebijakan Publik Banten Lama

Rafa Thahirah¹, Nadia Khumairatun Nisa², Diyana Anis Asharika³, Amanda Putri Handriyanti⁴, Ananda Chanaya Meutya Lestari⁵, Luthfiyyah Annisa Paramita⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: 6670230073@untirta.ac.id¹, 6670230159@untirta.ac.id²

Article History:

Received: 15 November 2025

Revised: 01 Januari 2025

Accepted: 11 Januari 2026

Keywords: hegemoni,

Antonio Gramsci, revitalisasi, Banten Lama, budaya, politik lokal.

Abstract: Revitalisasi kawasan religi Banten Lama merefleksikan dinamika relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat dalam membentuk kesadaran kultural melalui simbol-simbol religius. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan revitalisasi tersebut menjadi instrumen hegemoni kultural sebagaimana dijelaskan oleh Antonio Gramsci, di mana kekuasaan bekerja bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui pembentukan persetujuan (consent) dan kepemimpinan moral dalam masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada pihak Dinas Kebudayaan, akademisi, serta tokoh masyarakat di sekitar kawasan Banten Lama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Banten Lama bukan sekadar proyek pelestarian sejarah, melainkan proses politik yang meneguhkan kekuasaan melalui narasi keagamaan dan kebanggaan identitas lokal. Pemerintah daerah berhasil mengkonstruksi legitimasi moral dengan membingkai revitalisasi sebagai upaya pelestarian warisan Islam Banten, sementara masyarakat memberikan persetujuan simbolik karena melihat revitalisasi sebagai penguatan nilai sejarah dan peningkatan ekonomi lokal. Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, proses ini mencerminkan terbentuknya moral leadership yang menghasilkan konsensus sosial, sekaligus memperlihatkan praktik transformisme dan passive revolution di mana kekuatan masyarakat diserap ke dalam agenda negara. Penelitian ini menegaskan bahwa revitalisasi Banten Lama merupakan bentuk hegemoni kultural yang tampak alami, tetapi sesungguhnya dibangun melalui proses politik yang sistematis, sehingga membuka ruang refleksi terhadap pentingnya partisipasi kritis masyarakat dalam setiap proyek kebudayaan.

PENDAHULUAN

Banten Lama merupakan salah satu pusat peradaban penting di Nusantara sejak abad ke-16, terutama sebagai pelabuhan internasional penghasil lada yang menjalin hubungan dagang dengan Asia hingga Eropa (Muzhiat, 2021). Kejayaan ini mulai berubah sejak masuknya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal abad ke-17 (Basri et al., 2024). Kolonialisme Belanda ditandai dengan pendirian Benteng Speelwijk tahun 1681 dan monopoli perdagangan lada yang membatasi akses pedagang pribumi (Yuli Kristian, 2019). Dampaknya tidak hanya pada runtuhnya Keraton Surosowan tahun 1813, tetapi juga pada perubahan struktur sosial-ekonomi yang menimbulkan kesenjangan antara elit birokrat lokal dan masyarakat pribumi.

Jejak kolonialisme masih tampak dalam tata ruang, infrastruktur, dan identitas kawasan Banten Lama. Bekas pelabuhan Karangantu kini menjadi situs sejarah, sedangkan segregasi permukiman kolonial, Tionghoa, dan pribumi masih terekam dalam peta abad ke-17–18 (Pradani et al., 2020). Warisan ini menunjukkan bahwa kolonialisme turut membentuk arah pembangunan kota hingga masa kini. Sejak 2017, kawasan Banten Lama menjadi fokus *Program Revitalisasi Kawasan* dengan anggaran awal Rp 18 miliar dan meningkat menjadi Rp 20 miliar pada 2019 melalui Dinas PURP Provinsi Banten. Total kebutuhan revitalisasi mencapai Rp 220 miliar untuk memperbaiki kanal, pedestrian, Keraton Kaibon, Masjid Pecinan, dan Benteng Speelwijk (Cipta, 2018). Revitalisasi tersebut meningkatkan wisata, dengan kunjungan mencapai rata-rata 17.000 orang per hari pada libur Lebaran 2025, naik 40% dari tahun sebelumnya (Bantenintens, 2025)

pembangunan dinilai terlalu berorientasi pada pariwisata religi tanpa menyingkap dimensi kolonialisme yang turut membentuk Banten Lama. Padahal, memahami jejak kolonial penting untuk menilai kebijakan pembangunan dan pelestarian budaya masa kini. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengurai bagaimana warisan kolonial, khususnya dalam aspek tata ruang dan identitas religius, menjadi landasan kebijakan pembangunan kontemporer di kawasan bersejarah ini.

Kajian tentang hubungan antara warisan budaya-religi, modernitas, dan kebijakan publik telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif. Takko Bandung et al. (2025) dalam “*Antara Hegemoni dan Tradisi: Analisis Pengaruh Modernitas terhadap Eksistensi Ogoh-Ogoh di Bali*” menunjukkan bahwa modernitas melalui pariwisata mendorong komersialisasi tradisi, namun masyarakat tetap melakukan resistensi untuk mempertahankan makna ritual. Studi ini menegaskan adanya tarik-menarik antara hegemoni modern dan tradisi lokal, sejalan dengan penelitian ini yang juga mengkaji relasi antara religiusitas dan kekuasaan, meski fokusnya berbeda—yakni pada reproduksi sejarah religi Banten dalam kebijakan publik.

Penelitian Ferdian et al. (2025) tentang “*Transformasi Digital dalam Mengembangkan Wisata Budaya dan Religi di Banten Lama*” memperlihatkan bahwa digitalisasi efektif meningkatkan promosi wisata, tetapi sering kali menonjolkan aspek visual-ikonik sehingga menggeser nilai historis-religius. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas konstruksi narasi pemerintah, meski penelitian ini menyoroti legitimasi kebijakan sebagai strategi hegemonik (Ferdian et al., 2025). Kembali et al. (2023) melalui “*Reviewing the Traces of Islamic Civilization in the Old Banten Region*” menegaskan posisi Banten Lama sebagai pusat peradaban Islam dengan bukti historis dan arkeologis, sedangkan penelitian ini mengembangkan pendekatan kritis untuk melihat bagaimana jejak sejarah tersebut dilembagakan dalam kebijakan publik (Kembali et al., 2023)

Pakhudin et al. (2022) menyoroti kendala birokrasi, keterbatasan anggaran, dan konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan pariwisata Banten Lama. Sementara itu, penelitian ini menekankan dimensi ideologis, dengan menelaah mengapa nilai-nilai religius dipilih sebagai dasar

legitimasi kebijakan dan siapa aktor yang diuntungkan. Pentingnya tradisi lisan dalam membangun identitas religius dan ekonomi masyarakat Banten Lama. Penelitian ini berupaya melangkah lebih jauh dengan menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut dilembagakan oleh pemerintah sebagai strategi hegemoni dalam kebijakan pembangunan (Suendarti, 2021).

Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana sejarah religi yang melekat pada Banten Lama, khususnya warisan Islam dari masa Kesultanan Banten, dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembangunan kawasan dan perumusan kebijakan publik yang berkelanjutan. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana nilai-nilai religius tersebut memengaruhi identitas masyarakat, arah pembangunan, serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan sejarah dan kebutuhan modernisasi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam integrasi nilai-nilai religi ke dalam kebijakan publik, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan tokoh agama dalam menjaga kekhasan Banten Lama sebagai kawasan bersejarah dan religius.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran sejarah religi Banten Lama, khususnya warisan Kesultanan Banten, sebagai dasar dalam pembangunan kawasan dan penyusunan kebijakan publik oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai religius yang historis dapat diintegrasikan ke dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada mencerminkan pelestarian dan pemanfaatan nilai-nilai tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bentuk kolaborasi antara masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan Banten Lama sebagai kawasan bersejarah yang memiliki nilai spiritual tinggi.

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian interdisipliner antara sejarah, religi, dan kebijakan publik dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai religius dapat dijadikan dasar konseptual dalam pembangunan daerah, sekaligus memperbarui literatur yang selama ini lebih banyak menekankan aspek ekonomi atau politik semata. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berakar pada identitas historis dan religius Banten Lama, memperkuat upaya pelestarian kawasan warisan budaya, mendorong pengembangan pariwisata religi sebagai sumber kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga lokal dalam proses pembangunan yang lebih partisipatif.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan konsep hegemoni Antonio Gramsci (1971) untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui paksaan (*coercion*), tetapi juga melalui persetujuan (*consent*) yang dibangun di masyarakat melalui institusi sosial, agama, pendidikan, dan budaya. Gramsci menekankan adanya dua arena kekuasaan—*political society* (negara, aparat hukum, militer) dan *civil society* (agama, budaya, media)—yang saling berinteraksi dalam mempertahankan dominasi (Brigham, 1971). Dalam konteks Banten Lama, kolonialisme tidak hanya bersifat koersif, tetapi juga hegemonik; pembangunan pelabuhan, gudang, dan tata ruang kota diarahkan untuk kepentingan kolonial namun ditampilkan sebagai bentuk “kemajuan” yang diterima masyarakat (Wijono, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana dikemukakan Creswell, “*qualitative research is an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*” (Creswell, 2007). yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus dalam konteks nyata. Kasus yang diteliti

adalah kawasan Banten Lama sebagai pusat sejarah dan religi yang kini menjadi fokus revitalisasi pemerintah daerah. Lokasi penelitian berada di Kota Serang, Provinsi Banten, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam bersama pejabat pemerintah, tokoh agama, budayawan, serta masyarakat sekitar yang terdampak program revitalisasi. Selain itu observasi lapangan dan studi dokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi data primer dan sekunder yang berasal dari arsip kolonial, peraturan daerah, serta data kunjungan wisatawan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengorganisasian, koding tematik, deskripsi kasus, hingga interpretasi makna kebijakan publik terhadap warisan sejarah religi Banten Lama. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, member check, serta audit trail sehingga hasil penelitian lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Banten sejak masa kesultanan memperlihatkan bahwa Islam bukan hanya sistem keyakinan, tetapi juga fondasi pembentukan kekuasaan politik dan sosial. Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16 dengan menjadikan ulama dan jaringan pesantren sebagai sumber legitimasi moral bagi pemerintahan (Darmayanti & Bahauddin, 2015). Hubungan antara sultan dan ulama menciptakan pola kekuasaan religius yang kuat, di mana simbol-simbol Islam dijadikan instrumen untuk membangun otoritas politik dan sosial di tengah masyarakat (Syukron Jauhar Fuad Faizin, 2023).

Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa dikenal sebagai figur yang menggunakan nilai-nilai Islam untuk memperluas pengaruh dan memperkuat solidaritas sosial masyarakat Banten (Hadi Wibowo, 2022). Peran ulama sangat signifikan dalam meneguhkan tatanan moral dan hukum Islam di istana, menjadikan legitimasi kekuasaan sultan bersandar pada nilai religius (Darmayanti & Bahauddin, 2015). Dalam hal ini Islam menjadi ideologi pemerintahan sekaligus alat politik untuk menata relasi kekuasaan antara istana dan rakyat (Syukron Jauhar Fuad Faizin, 2023).

Hal ini juga terlihat dari simbol-simbol arsitektur religius seperti Masjid Agung Banten yang berfungsi sebagai pusat kekuasaan spiritual dan politik (Hikmawan et al., 2020). Menurut pandangan beberapa sejarawan lokal, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga simbol kekuatan sosial yang mempersatukan rakyat dan elite (Hadi Wibowo, 2022). Dengan demikian, akar kekuasaan di Banten terbentuk melalui harmoni antara agama dan politik, yang menjadi warisan ideologis hingga kini.

Masa kolonial Belanda membawa perubahan signifikan terhadap arah pembangunan dan struktur kekuasaan di Banten Lama. Intervensi VOC pada abad ke-17 menggeser fungsi pelabuhan dan sistem ekonomi yang sebelumnya berbasis pada perdagangan maritim ke arah ekonomi monopoli kolonial (Ensering, 1995). Benteng Speelwijk yang didirikan oleh VOC menjadi simbol hegemoni kolonial di wilayah Banten, menandai perubahan dari sistem kekuasaan religius menuju dominasi politik-ekonomi Eropa.

Dampak kolonialisme juga terlihat pada tata ruang kota Banten Lama yang kini memperlihatkan dualitas antara situs Islam (Masjid Agung, keraton, makam sultan) dan peninggalan kolonial (benteng, gudang, pelabuhan) (Hadi Wibowo, 2022). Dinas Kebudayaan Provinsi Banten melalui wawancara menyebutkan bahwa pelestarian situs kolonial menjadi bagian dari strategi wisata sejarah, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan narasi antara religiusitas dan kolonialisme.

Dalam kebijakan revitalisasi kawasan Banten Lama, pemerintah daerah tampak menggunakan citra “Banten Religius” sebagai cara untuk memperkuat legitimasi sosial dan

politiknya di mata masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, branding “Serang Kota Santri dan Sejarah” dijadikan dasar utama dalam pengembangan wisata daerah. Pihak dinas menjelaskan bahwa strategi promosi dilakukan melalui festival-festival religi seperti Festival Ziarah Wali dan Haul Kesultanan Banten, serta promosi digital dengan menggandeng influencer lokal dan komunitas pecinta sejarah Islam. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memperlihatkan diri sebagai pihak yang menjaga warisan spiritual sekaligus mendorong perekonomian masyarakat sekitar.

Dalam pernyataannya, Dinas Pariwisata juga menegaskan bahwa narasi religius memiliki dua fungsi penting, yaitu fungsi ekonomi dan simbolik. Dari sisi ekonomi, kegiatan wisata religi mampu menggerakkan sektor UMKM, transportasi, dan kuliner. Sementara dari sisi simbolik, penggunaan citra keislaman dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah Banten yang dikenal sebagai pusat penyebaran Islam pada masa Kesultanan. Pemerintah daerah berusaha menampilkan diri sebagai pewaris nilai-nilai Islam yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Hal ini terlihat dari tagline promosi “Menelusuri Jejak Iman dan Kejayaan” yang menggambarkan upaya untuk menautkan nilai spiritual dengan kebanggaan sejarah lokal (Harnani et al., 2025).

Penggunaan citra religius ini tidak sepenuhnya bebas dari kritik. sewaktu wawancara, pihak dinas mengakui bahwa promosi yang terlalu menonjolkan unsur religius kadang membuat wisatawan umum merasa kurang tertarik. Mereka juga menyadari bahwa masyarakat memiliki pandangan beragam terhadap wisata religi, terutama terkait kekhawatiran bahwa nilai kesakralan bisa berubah menjadi komersialisasi. Pemerintah berusaha menjawab hal itu dengan melakukan dialog bersama masyarakat dan menetapkan batasan kegiatan hiburan di area suci agar nilai spiritual tetap terjaga.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa citra “Banten Religius” tidak hanya digunakan untuk kepentingan spiritual, tetapi juga menjadi alat politik yang secara halus memperkuat legitimasi pemerintah. Dengan mengaitkan kebijakan pembangunan pada nilai-nilai Islam, pemerintah memperoleh dukungan moral dari masyarakat dan lembaga keagamaan. Citra religius ini membantu menciptakan kesan bahwa kebijakan revitalisasi Banten Lama bukan semata proyek ekonomi, melainkan juga bagian dari misi pelestarian identitas keislaman daerah (Lubis et al., 2024). Akan tetapi, realitasnya masih memperlihatkan ketimpangan perhatian terhadap sektor lain, seperti wisata alam dan budaya non-religius yang merasa kurang mendapat ruang dalam kebijakan promosi.

Dapat disimpulkan bahwa religiusitas yang diusung pemerintah daerah melalui citra “Banten Religius” bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia menjadi sumber kebanggaan dan legitimasi moral bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Jika dilihat dari sudut pandang lain, nilai-nilai Islam yang dijadikan dasar narasi tersebut cenderung dimanfaatkan secara simbolik dan pragmatis untuk memperoleh dukungan sosial serta keuntungan ekonomi (Sariyatun, 2018). Pemerintah tampak berusaha menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan komersial, tetapi arah kebijakan menunjukkan bahwa nilai religius juga berfungsi sebagai alat politik untuk meneguhkan citra pemerintah sebagai pengayom warisan Islam di Banten.

Revitalisasi kawasan Banten Lama bukan hanya proyek fisik untuk memperindah situs bersejarah, tetapi juga merupakan arena ideologis tempat kekuasaan dan kesadaran sosial dinegosiasikan. Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, setiap upaya pembangunan yang mengatasnamakan pelestarian budaya selalu sarat dengan upaya pembentukan consent atau persetujuan sosial. Hegemoni, menurut Gramsci, bukanlah bentuk dominasi koersif, melainkan upaya membangun kepemimpinan moral dan intelektual agar masyarakat menerima suatu tatanan sebagai sesuatu yang wajar dan sah (Mariati et al., 2023). Dengan kata lain, revitalisasi Banten

Lama dapat dibaca sebagai praktik kultural yang mengukuhkan legitimasi negara daerah melalui bahasa pelestarian dan religiusitas.

Bidang Kebudayaan dan Dinas Pariwisata membangun narasi yang menekankan pentingnya melestarikan sejarah dan identitas Islam Banten. Mereka berkoordinasi dalam dua dimensi berbeda: kebudayaan berperan sebagai pengembang narasi sejarah, sementara pariwisata menjadi saluran materialisasi melalui kegiatan ekonomi dan promosi destinasi. Tetapi di balik koordinasi tersebut, terdapat bentuk war of position sebagaimana dijelaskan Gramsci perang posisi dalam ranah kultural di mana dominasi tidak diwujudkan secara langsung, tetapi melalui pergeseran kesadaran dan penerimaan terhadap nilai-nilai tertentu. Narasi pelestarian sejarah dijadikan alat untuk membangun rasa kebersamaan yang menutupi struktur kekuasaan di baliknya.

Program seperti outing class ke situs Banten Lama, yang dijalankan oleh Bidang Kebudayaan, adalah contoh nyata dari produksi kesadaran hegemonik. Siswa diperkenalkan pada sejarah kesultanan dan masjid agung sebagai simbol kebanggaan daerah. Tetapi pengalaman tersebut secara tidak langsung menanamkan satu tafsir tunggal tentang sejarah yakni glorifikasi masa lalu Islam dan kesultanan sementara narasi alternatif seperti sejarah kolonialisme, ketimpangan sosial, atau dinamika kelas sering kali diabaikan. Proses ini mencerminkan pembentukan common sense hegemonik, di mana masyarakat secara sukarela menyetujui wacana dominan karena telah menjadi bagian dari kesadaran keseharian mereka.

Hegemoni bekerja secara halus, melalui pendidikan, bahasa, dan simbol-simbol moral yang dikemas dalam bentuk kebijakan publik. di revitalisasi Banten Lama, persetujuan masyarakat bukanlah hasil paksaan, tetapi hasil internalisasi ideologi yang dibungkus nilai-nilai religius. Ketika masyarakat percaya bahwa revitalisasi adalah upaya bersama untuk melestarikan sejarah dan memperkuat keislaman, maka proyek tersebut memperoleh legitimasi moral tanpa perlu paksaan politik. Keterlibatan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah semakin memperkuat struktur hegemoni ini. Keduanya mendukung revitalisasi atas dasar moralitas, dengan argumen pelestarian nilai Islam dan edukasi spiritual masyarakat. Akan tetapi, perbedaan tafsir mereka tidak mengganggu dominasi wacana utama, karena keduanya tetap beroperasi dalam horizon ideologis yang sama: bahwa revitalisasi adalah bentuk kebaikan kolektif. Hal ini menunjukkan apa yang disebut Gramsci sebagai transformisme proses di mana potensi kritis dari kelompok sosial diintegrasikan ke dalam blok hegemonik melalui kompromi moral. Dengan demikian, organisasi keagamaan yang semula berpotensi menjadi kekuatan alternatif justru menjadi bagian dari sistem persetujuan sosial yang menopang legitimasi negara daerah.

Dari sudut pandang lain kalangan akademisi lokal juga berperan dalam reproduksi hegemoni. Banyak dosen dan peneliti diundang untuk memberikan masukan atau riset konseptual terhadap revitalisasi, namun kontribusi tersebut lebih sering memperkuat legitimasi proyek daripada mengkritisnya. Dalam pandangan Gramsci, kaum intelektual adalah agen penting dalam membentuk kesadaran masyarakat (organic intellectuals), tetapi mereka juga rentan menjadi alat pembenaran ideologis ketika pengetahuannya dilembagakan dalam kerangka kekuasaan. Dalam konteks Banten Lama, para akademisi lebih banyak berfungsi sebagai penyedia narasi yang menegaskan identitas sejarah ketimbang membuka ruang perdebatan kritis tentang makna pelestarian itu sendiri.

Masyarakat lokal pada akhirnya menjadi subjek dari proses hegemoni ini. Mereka menyetujui revitalisasi karena merasakan manfaat langsung perbaikan infrastruktur, peningkatan pendapatan ekonomi, dan peningkatan citra daerah. Tetapi kesepakatan ini merupakan bentuk passive revolution sebagaimana dijelaskan Gramsci, yaitu perubahan sosial yang tampak

partisipatif tetapi dikendalikan dari atas. Partisipasi masyarakat bersifat simbolik, diatur dalam format yang telah ditentukan, tanpa ruang signifikan untuk mendefinisikan arah dan makna revitalisasi itu sendiri. Hegemoni dengan demikian beroperasi bukan untuk menindas secara langsung, melainkan untuk membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat agar sejalan dengan kepentingan dominan.

Dengan membaca revitalisasi Banten Lama melalui kacamata teori hegemoni Gramsci, tampak bahwa konsensus sosial yang tercipta bukanlah bentuk kesetaraan ideologis, melainkan hasil dari kerja ideologis yang panjang. Negara daerah menggunakan simbol sejarah, agama, dan kebanggaan lokal sebagai perangkat hegemonik yang memproduksi kesadaran baru kesadaran yang membuat masyarakat percaya bahwa revitalisasi adalah kepentingan mereka sendiri. Seperti yang dikemukakan Gramsci, hegemoni kultural bekerja dengan cara memproduksi “kepemimpinan moral” di mana masyarakat rela tunduk karena merasa menjadi bagian dari sesuatu yang luhur. Revitalisasi Banten Lama, dengan demikian, adalah cermin dari keberhasilan hegemoni dalam membentuk moral consent yang tampak alami, padahal dibangun melalui proses politik yang terstruktur.

Maka dari itu lah analisis teoritis ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak pernah netral. Ia selalu merupakan arena produksi dan reproduksi kekuasaan. Hegemoni menuntut kita untuk membaca kebijakan pelestarian bukan sekadar sebagai bentuk cinta sejarah, tetapi sebagai instrumen untuk mengarahkan kesadaran kolektif. Kritik terhadap proses ini bukan berarti menolak pelestarian, tetapi menegaskan perlunya membuka ruang counter hegemonik ruang di mana masyarakat dapat menafsirkan sejarah mereka secara otonom dan plural. Dengan cara inilah revitalisasi dapat benar-benar menjadi praktik demokratis, bukan sekadar bentuk reproduksi ideologi yang berbalut nilai-nilai luhur.

Modernisasi di kawasan Banten Lama membawa dinamika yang menarik antara pelestarian nilai religius dengan tuntutan pembangunan. Sebagai salah satu pusat sejarah Islam di Indonesia, Banten Lama tidak hanya dikenal karena situs-situs sakralnya seperti Masjid Agung Banten dan kompleks makam Sultan Maulana Hasanuddin, tetapi juga karena atmosfer spiritual yang menyelimuti kawasan tersebut. Tetapi pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka revitalisasi sering kali menimbulkan pertanyaan, apakah modernisasi benar-benar memperkuat nilai-nilai religi, atau justru mengikis makna spiritual yang telah lama hidup di tengah masyarakat? Di satu sisi, peningkatan infrastruktur seperti jalan, area parkir, dan fasilitas wisata membuat kawasan ini lebih mudah diakses dan nyaman bagi para peziarah serta wisatawan. Hal ini bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan upaya menjaga keberlanjutan situs-situs keagamaan. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perubahan fisik dan arus wisata yang semakin besar dapat menggeser suasana sakral menjadi sekadar objek wisata komersial (Ferdian et al., 2025).

Pandangan masyarakat dan akademisi menunjukkan spektrum yang beragam. Beberapa dosen dan pemerhati budaya menilai bahwa revitalisasi seharusnya tidak berhenti pada aspek fisik semata, melainkan harus mempertahankan nilai historis dan spiritualitas yang melekat pada setiap bangunan dan tradisi di Banten Lama. Bagi sebagian warga, modernisasi memang membawa manfaat ekonomi, seperti meningkatnya pendapatan dari sektor perdagangan dan jasa wisata. Ada pula yang merasa bahwa makna ziarah kini mulai bergeser dari aktivitas spiritual yang sarat nilai religius menjadi kegiatan wisata yang lebih berorientasi pada hiburan dan keuntungan finansial. Fenomena komersialisasi ziarah, seperti menjamurnya pedagang suvenir, jasa parkir, dan kuliner di sekitar area makam, memperlihatkan bagaimana nilai-nilai religi beradaptasi dalam konteks ekonomi modern.

Modernisasi di Banten Lama bukan sekadar persoalan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pergeseran identitas religius masyarakatnya. Nilai-nilai spiritual yang dahulu menjadi pedoman moral dan sosial kini menghadapi tantangan baru untuk tetap relevan di tengah arus globalisasi dan ekonomi wisata. Meski demikian, adaptasi ini tidak selalu berarti kehilangan makna. Justru dalam beberapa kasus, masyarakat menunjukkan kemampuan untuk menyeimbangkan antara menjaga kesakralan dan menerima modernisasi sebagai bagian dari strategi pelestarian. Pertanyaan besar yang tersisa adalah sejauh mana nilai-nilai religius itu tetap menjadi roh yang menjiwai kehidupan masyarakat Banten Lama, bukan hanya simbol yang dikomersialisasi untuk menarik wisatawan (Suryani, A. J. (2025).

Dalam konteks tersebut, masa depan Banten Lama sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai spiritual dapat dijaga. Pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat lokal perlu berkolaborasi dalam merancang kebijakan dan kegiatan revitalisasi yang tidak hanya menonjolkan aspek ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi religius dan edukatif dari kawasan ini. Pendidikan masyarakat mengenai sejarah dan makna spiritual Banten Lama menjadi langkah penting agar generasi muda tidak hanya mengenalnya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai warisan peradaban Islam yang sarat nilai moral dan budaya. Jika modernisasi mampu diarahkan untuk memperkuat kesadaran sejarah dan memperdalam pemahaman keagamaan, maka Banten Lama bisa menjadi contoh nyata bagaimana kemajuan dan spiritualitas dapat berjalan beriringan. Jika aspek ekonomi menjadi terlalu dominan tanpa diimbangi dengan pemeliharaan nilai-nilai sakral, maka dikhawatirkan identitas religius Banten Lama lambat laun akan memudar, berganti dengan citra komersial yang kehilangan ruh keagamaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan agar setiap langkah pembangunan selalu berpijak pada prinsip keseimbangan antara kemajuan fisik dan kelestarian spiritual.

Dengan demikian, modernisasi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai religius, melainkan sebagai peluang untuk menampilkan wajah baru Banten Lama yang lebih terbuka, inklusif, dan tetap berakar pada tradisi Islam yang kuat. Upaya pelestarian nilai-nilai religius dapat diwujudkan melalui pendekatan kultural, seperti penguatan kegiatan keagamaan, pengajaran sejarah Islam lokal di sekolah-sekolah, dan pengembangan wisata edukatif yang menonjolkan aspek spiritual, bukan sekadar hiburan. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal sebagai penjaga nilai-nilai tradisi menjadi kunci penting agar transformasi yang terjadi tidak menghapus identitas mereka sendiri. Dalam kerangka ini, Banten Lama berpotensi menjadi model kawasan religi yang modern namun tetap menjaga keaslian makna spiritualnya tempat di mana nilai-nilai moral, sejarah, dan ekonomi saling menguatkan. Pada akhirnya, keberhasilan modernisasi di Banten Lama tidak akan diukur dari megahnya bangunan atau banyaknya wisatawan, melainkan dari sejauh mana masyarakatnya mampu mempertahankan keseimbangan antara kemajuan dan kesakralan yang telah menjadi ruh dari warisan leluhur mereka.

Jika keseimbangan tersebut dapat terus dijaga, maka Banten Lama tidak hanya akan menjadi destinasi wisata religi, tetapi juga simbol harmoni antara tradisi dan kemajuan. Kawasan ini dapat berfungsi sebagai ruang spiritual yang hidup di tengah perubahan zaman tempat di mana modernitas tidak menyingkirkan nilai religius, melainkan memperkuatnya melalui inovasi yang berlandaskan pada kearifan lokal dan ajaran Islam. Dengan demikian, Banten Lama akan tetap menjadi pusat identitas keagamaan dan kebanggaan budaya masyarakat Banten, sekaligus bukti bahwa modernisasi dan spiritualitas dapat berjalan seiring tanpa saling meniadakan.

Dalam konteks revitalisasi dan modernisasi Banten Lama, dinamika sosial yang muncul dapat dibaca melalui lensa teori hegemoni Antonio Gramsci. Pemerintah, sebagai aktor dominan, memainkan peran hegemonik dengan menentukan arah narasi pembangunan dan wacana kemajuan

yang dibungkus dengan dalih pelestarian budaya serta peningkatan ekonomi. Melalui kebijakan dan proyek revitalisasi, pemerintah membangun konsensus bahwa modernisasi adalah jalan menuju kesejahteraan bersama. Tetapi di balik narasi tersebut, terdapat proses dominasi simbolik yang mengatur bagaimana masyarakat seharusnya memahami nilai sejarah dan spiritualitas Banten Lama. Pemerintah bukan hanya menguasai aspek fisik pembangunan, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang apa yang dianggap “kemajuan” dan “pelestarian,” sehingga makna religius sering kali terkooptasi dalam kerangka pembangunan yang bersifat teknokratis (Mahadi, 2020).

Meski demikian, hegemoni ini tidak berjalan secara mutlak. Di ruang sosial Banten Lama, berbagai kelompok seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, tokoh lokal, hingga komunitas masyarakat menunjukkan bentuk resistensi dan negosiasi terhadap wacana dominan tersebut. Resistensi ini tidak selalu dalam bentuk penolakan terbuka, melainkan melalui upaya mempertahankan praktik-praktik keagamaan tradisional, memperkuat kegiatan dakwah, dan memperjuangkan agar revitalisasi tidak menghapus identitas spiritual kawasan. Misalnya, kegiatan ziarah, pengajian, dan ritual keagamaan masih dijaga sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap komersialisasi yang berlebihan. Dalam hal ini, agama berfungsi ganda: di satu sisi digunakan oleh kekuasaan untuk melegitimasi pembangunan, namun di sisi lain menjadi sumber kekuatan moral bagi masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai sakral.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hegemoni bukanlah kekuasaan yang absolut, melainkan selalu terbuka untuk dipertanyakan dan dinegosiasikan. Masyarakat Banten Lama tidak pasif dalam menerima modernisasi; mereka aktif menafsirkan ulang maknanya sesuai dengan nilai-nilai religius yang mereka pegang. Harapan baru muncul ketika proses pembangunan tidak lagi dimaknai sebagai proyek sepihak dari negara, melainkan sebagai ruang dialog antara pemerintah, organisasi keagamaan, dan warga lokal. Dalam konteks ini, resistensi tidak semata-mata berarti penolakan, melainkan ekspresi kesadaran kritis untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan spiritualitas. Jika semangat ini terus dipelihara, maka Banten Lama dapat menjadi contoh bagaimana masyarakat lokal mampu menegosiasikan makna pembangunan tanpa kehilangan jati diri religiusnya, sekaligus membuktikan bahwa kekuasaan selalu mengandung potensi perlawanan dan harapan untuk perubahan yang lebih berkeadilan.

Dengan demikian, dinamika hegemoni dan resistensi di Banten Lama memperlihatkan bahwa pembangunan tidak pernah menjadi proses yang netral. Selalu ada tarik-menarik kepentingan antara kekuasaan yang ingin menegakkan legitimasi dan masyarakat yang berupaya menjaga ruang otonominya dalam menafsirkan makna kemajuan. Dalam kerangka Gramsci, situasi ini mencerminkan adanya war of position perjuangan kultural yang berlangsung secara halus dan berkelanjutan melalui praktik, simbol, dan narasi sosial. Masyarakat Banten Lama, melalui lembaga keagamaan dan tradisi spiritualnya, berperan aktif dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan identitas lokal di tengah arus modernisasi yang cenderung menstandarkan makna (Sinaga et al., 2025.)

Harapan ke depannya terletak pada kemampuan semua pihak untuk membangun bentuk hegemoni baru yang lebih partisipatif dan juga berkeadilan, di mana nilai-nilai religius tidak lagi diposisikan sebagai alat kekuasaan, tetapi menjadi sumber inspirasi etis dalam merancang arah pembangunan. Jika dialog antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat terus dikembangkan secara setara, maka revitalisasi Banten Lama dapat melahirkan model pembangunan berbasis nilai yang menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi (Wibowo et al., 2021). Dengan cara itu, Banten Lama bukan hanya akan dikenal sebagai situs warisan sejarah Islam, tetapi juga sebagai ruang hidup yang mencerminkan kesadaran kritis masyarakat terhadap makna kemajuan yang

berkeadaban dan berkeimanan.

Pada akhirnya, perjuangan mempertahankan nilai religius di tengah arus modernisasi Banten Lama mencerminkan upaya masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keyakinan. Proses ini menunjukkan bahwa identitas spiritual bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang melalui dialog dan negosiasi sosial. Jika semangat kritis dan partisipatif ini terus terpelihara, maka Banten Lama tidak hanya menjadi simbol sejarah masa lalu, tetapi juga representasi harapan baru bagi masa depan yang lebih inklusif di mana kemajuan material dan kekuatan moral berjalan seiring dalam harmoni yang berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai religius yang mendalam.

Secara konseptual, revitalisasi dimaksudkan untuk melestarikan warisan sejarah dan memperkuat identitas religius kawasan. Tetapi proses tersebut menimbulkan dilema antara pelestarian nilai historis dan dorongan komersialisasi berbasis pariwisata. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana revitalisasi benar-benar merepresentasikan upaya pelestarian sejarah, atau justru menjadi strategi estetik untuk kepentingan ekonomi semata (Nuruddin, 2023). Berdasarkan pengamatan lapangan dan temuan empiris, revitalisasi Banten Lama cenderung menitikberatkan pada aspek fisik, seperti perbaikan infrastruktur dan penataan ruang publik, tanpa diimbangi dengan pelestarian nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat dalam memori kolektif masyarakat. Akibatnya, revitalisasi berpotensi menimbulkan bentuk “dehistorisasi” ruang, di mana simbol-simbol keagamaan dan historis hanya berfungsi sebagai ornamen tanpa makna kontekstual (Rusata & Hamidah, 2023).

Bagi masyarakat sekitar, perubahan tersebut menghadirkan dampak ambivalen. Di satu sisi, peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor wisata memberikan peluang kesejahteraan baru. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat mengalami keterpinggiran sosial dan kehilangan ruang kultural akibat pergeseran fungsi kawasan. Minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam proses perumusan kebijakan memperkuat kesan bahwa revitalisasi lebih berorientasi top-down daripada berbasis kebutuhan komunitas. Diah Sri Widari (2023) Arah kebijakan revitalisasi seharusnya dikembangkan dengan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat, tokoh agama, dan ahli sejarah sebagai subjek utama. Revitalisasi Banten Lama perlu dimaknai tidak semata sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi sebagai upaya rekonstruksi nilai dan identitas historis yang berakar pada warisan Islam Kesultanan Banten. Dengan demikian, pembangunan kawasan dapat berjalan secara berkeadilan, berkelanjutan, serta mencerminkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan pelestarian memori sejarah (Kartono et al., 2024).

KESIMPULAN

Revitalisasi kawasan religi Banten Lama mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja secara halus melalui pembentukan persetujuan (*consent*) dan kepemimpinan moral sebagaimana dijelaskan oleh Antonio Gramsci. Proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya pelestarian sejarah, tetapi juga menjadi instrumen politik yang meneguhkan dominasi negara melalui narasi keagamaan dan kebanggaan identitas lokal. Pemerintah daerah berhasil membangun legitimasi moral dengan membungkus revitalisasi sebagai bentuk pengabdian terhadap warisan Islam Banten, sehingga masyarakat memberikan persetujuan simbolik yang tampak alami. Di balik kesepakatan tersebut, revitalisasi sesungguhnya mereproduksi struktur kekuasaan yang mengatur cara masyarakat memahami sejarah dan budaya mereka sendiri. Hegemoni dalam konteks ini tidak hadir melalui paksaan, melainkan melalui internalisasi nilai dan makna yang disepakati bersama. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang hegemoni kultural di ranah kebijakan budaya Indonesia serta menegaskan pentingnya partisipasi kritis masyarakat dalam

menentukan arah pelestarian warisan budaya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada lingkup data yang berfokus pada wawancara kualitatif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan keragaman pandangan masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan etnografis dan studi komparatif agar dapat menelusuri lebih dalam bagaimana masyarakat menafsirkan, menegosiasikan, atau bahkan menolak bentuk-bentuk hegemoni kultural dalam praktik revitalisasi di berbagai konteks lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Bantenintens. (2025, April). *Kunjungan Wisata Di Kota Serang Meningkat Pesat Selama Libur Lebaran 2025*. Bantenintens.Co.Id.
- Basri, M., Ningtya Ayu, S., Nabilla, G., Luara Berutu, S., Iskandar Ps, W. V, Estate, M., & Percut Sei Tuan, K. (2024). Background To The Arrival Of The Dutch, Voc, Dutch East Indies. In *Eductum: Journal Research* (Vol. 3, Issue 1).
- Brigham, A. (1971). *Principles In The Determination Of Boundaries*.
- Cipta, A. (2018, November). *Revitalisasi Wisata Sejarah Banten Lama, Rp 220 Milyar Disiapkan*. Tempo.
- Creswell, J. W. . (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Darmayanti, T. E. K. A., & Bahauddin, A. (2015). Aensi Journals Advances In Environmental Biology The Influence Of Social-Culture Of Banten Towards The Changes Of Banten Great Mosque Complex. In *Advances In Environmental Biology* (Vol. 9, Issue 4). [Http://Www.Aensiweb.Com/Aeb/](http://www.aensiweb.com/aeb/)
- Diyah Sri Widari, D. A. (2023). The Utilization Of Colonial Heritage In Tourism Development. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 38(4), 371–377. <https://doi.org/10.31091/Mudra.V38i4.2444>
- Ensering, E. (1995). Banten In Times Of Revolution. *Archipel*, 50(1), 131–163. <https://doi.org/10.3406/Arch.1995.3068>
- Ferdian, F., Bina Bangsa Munawaroh, U., Bina Bangsa Jl Raya Serang, U., & Cipocok Jaya, K. (2025). Transformasi Digital Dalam Mengembangkan Wisata Budaya Dan Religi Di Banten Lama. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1), 343–355. <https://doi.org/10.61722/Jirs.V2i1.3666>
- Hadi Wibowo, T. U. S. (2022). Cosmopolitanism Of The Sultanate Of Banten: An Overview Of Settlement And Social Structure Of The 15th Century. *Indonesian Historical Studies*, 5(2), 105–114. <https://doi.org/10.14710/Ihis.V5i2.11242>
- Harnani, H., Suryono, A., & Wanusmawatie, I. (2025). Policy Implementation Of Kayutangan Heritage Area Development In Malang City. *Jurnal Bina Praja*, 17(2). <https://doi.org/10.21787/Jbp.17.2025.2569>
- Hikmawan, M. D., Godjali, M. R., & Indriyany, I. A. (2020). Kyai And Power In Banten, Indonesia. *Shs Web Of Conferences*, 86, 01051. <https://doi.org/10.1051/Shsconf/20208601051>
- Kartono, K., Fadilah, M., Yuliantiningsih, A., & Thakur, A. (2024). Cultural Heritage Protection And Revitalization Of Its Local Wisdom: A Case Study. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 245–261. <https://doi.org/10.24090/Volksgeist.V7i2.11281>
- Kembali, M., Peradaban, J., Di, I., Banten Lama, K., & Leihitu, I. (2023). Reviewing The Traces Of Islamic Civilization In The Old Banten Region. *Indonesian Journal Of Islamic History And Culture*, 4(1), 1–23.
- Lubis, L., Wardiyanto, B., & Setijaningrum, E. (2024). Heritage Conservation In Indonesia: Policy

- Review. *Perspektif Hukum*, 129–146. <https://doi.org/10.30649/Ph.V24i1.276>
- Mahadi, M. (2020). Praktik Hegemoni Dalam Novel Orang-Orang Proyek Karya Ahmad Tohari (Kajian Hegemoni Gramsci). *Bapala*.
- Mariati, S., Rahmanita, M., Ingkadijaya, R., & Habibie, F. H. (2023). Integrated Historical And Religious Tourism Model Of Syech Quro's Tomb Complex In Karawang Regency, West Java Province, Indonesia. *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 21(1). <https://doi.org/10.24090/Ibda.V21i1.8124>
- Muzhiat, A. (2021). *Menelusuri Jejak Jalur Rempah Di Banten (Awal Interaksi Niaga Kesultanan Banten)*. Guepedia. <https://books.google.co.id/books?id=6rvkeaaaqbaj>
- Nuruddin. (2023). Revitalization And Development Of Cultural Heritage Tourism In Gresik Old City. *Journal Of Business On Hospitality And Tourism*, 9(1), 52. <https://doi.org/10.22334/Jbhost.V9i1.451>
- Pakhudin, Arenawati, & Stiawati, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Daerah Banten Lama Kota Serang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 151–167. <https://doi.org/10.30656/Sawala.V10i1.4096>
- Pradani, R. A., Herlambang, S., & Santoso, S. (2020). Studi Integrasi Wisata Religius Dan Wisata Bahari (Objek Studi: Kawasan Banten Lama Dan Pelabuhan Karangantu). *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 2(2), 2743. <https://doi.org/10.24912/Stupa.V2i2.8951>
- Rusata, T., & Hamidah, S. (2023). Pembangunan Inklusif Di Urban Heritage Kota Tua Jakarta Melalui Pariwisata Kreatif. *Jurnal Pengembangan Kota*, 11(2), 225–236. <https://doi.org/10.14710/Jpk.11.2.225-236>
- Sariyatun, -. (2018). Revitalization Model Of Ethnic Settlement To Preserve Cultural Heritage And Support Tourism In Surakarta. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 11(1), 99. <https://doi.org/10.17509/Historia.V11i1.12135>
- Sinaga, F., Sinaga, E., Sitanggang, N., Panta, Y., Sihite, R., & Hutapea, R. G. (N.D.). *Hegemony Of Power In The Poetry "I Wrote This Pamphlet" By W.S. Rendra: A Study Of Antonio Gramsci*. <https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Suendarti, M. (2021). Budaya Wisata Religi Dan Tradisi Lisan Sebagai Pemahaman Sejarah Di Situs Cagar Budaya Kesultanan Banten Lama (1526-1820). *Jurnal Pendidikan Ips*, 4(3), 225–236. <https://doi.org/10.30998/Herodotus.V4i3.10723>
- Syukron Jauhar Fuad Faizin. (2023). Spices And Diplomacy Of The Banten Sultanate With Foreign Kingdoms In The 16th- 19th Century. *Journal Of Islamic History And Manuscript*, 2(2), 161–180. <https://doi.org/10.24090/Jihm.V2i2.9362>
- Takko Bandung, A., Utama Ramadhan Shs, T., Sampe, E., Mutia Toppo, D., & Basri, I. (2025). *Jindar: Journal Of Interdisciplinary Language Studies And Dialect Research Antara Hegemoni Dan Tradisi: Analisis Pengaruh Modernitas Terhadap Eksistensi Ogoh-Ogoh Di Bali* (Vol. 1, Issue 1).
- Wibowo, G. A., Rahman, A., Chairuddin, C., Majida, A. Z., & Hermawan, D. (2021). Tourism Based On Historical Heritage In Langsa, Aceh, Indonesia. *The Indonesian Journal Of Social Studies*, 5(2), 77–87. <https://doi.org/10.26740/Ijss.V5n2.P77-87>
- Wijono, R. (2017). *Di Bawah Bayang-Bayang Ibukota: Penataan Daerah Di Provinsi Banten Dari Zaman Kolonial Sampai Zaman Reformasi*.
- Yuli Kristian, M. H. (2019). *Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1942*. Uwais Inspirasi Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=Yhmldwaaqbaj>